

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI
KECAMATAN MOJOLABAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Oleh:

Latifah Meyyana Enggar Wati

Nim. 19210076

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2023

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI
KECAMATAN MOJOLABAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Oleh:

Latifah Meyyana Enggar Wati

Nim. 19210076

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Nama : Latifah Meyyana Enggar Wati
NIM : 19210076
Program Studi : Akuntansi
Judul : Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Kecamatan Mojolaban

Disetujui dan disahkan:

Hari : 3 Maret 2023

Tanggal :

Pembimbing,



Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M.

NIDN.0607098403

Mengetahui,
Kepala Program Studi SI Akuntansi



Astuning Saharsini, S.E., M.Acc

NIDN. 0606129102

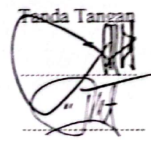
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Latifah Meyyana Enggar Wati
Nim : 19210076
Program Studi : Akuntansi
Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Kecamatan Mojolaban

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi gelar Sarjana Akuntansi

Pada hari : Jumat
Tanggal : 14 April 2023

Tim Penguji :
Ketua : Nur Khotimah, S.E., M.Sc
Anggota : Ang Hugscho Fachman
S.E., M.M

Tanda Tangan


Mengetahui

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Iswanto, S.E., M.M., MH

NIDN.0625127401

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DI KECAMATAN MOJOLABAN**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo

Yang memberi pernyataan



Latifah Meyyana Enggar Wati

MOTTO

“Tuhan tidak mewajibkan kita menang, sehingga kalahpun bukan dosa, yang terpenting adalah berjuang atau tidak”

(Emha Ainun Najib)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar

(Q.S Al Baqarah : 153)

“Banyak orang tidak mengumpulkan keberanian untuk menghidupkan impian mereka karena mereka takut mati”

(Les Brown)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang saya cintai yang telah mendoakan dan memberikan dukungan agar saya cepat lulus
2. Kepada kekasih saya yang selalu membantu dan memberikan semangat agar saya bisa menyelesaikan penelitian ini
3. Kepada sahabat saya Isnaini Galuh dan Abigel Maharani yang selalu membantu jika saya mengalami kesulitan

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Kecamatan Mojolaban”** Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto S.E., M.M., M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini S.E., M.Acc.selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Ibu Arif Farida S.E.,MA. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Arif Nugroho Rachman S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi sejak awal hingga akhir.
5. Seluruh Dosen Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan pendidikan dengan sebaik mungkin.
7. Kekasih penulis yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan

skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan yang selalu bertukar pikiran dan saling membantu dalam keadaan apapun.
9. Pegawai kelurahan yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam menyelesaikan kuesioner.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar skripsi ini dapat selesai dengan maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti dalam hal memberikan pengetahuan dan implementasi terutama dalam hal perencanaan keuangan.

Sukoharjo 14 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Masalah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Teori Yang Relevan.....	9
1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	9
2. Laporan Keuangan.....	9

3. Kualitas Laporan Keuangan.....	11
4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	13
5. Sumber Daya Manusia.....	15
6. Sistem Pengendalian Intern.....	16
7. Teknologi Informasi.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pikir.....	26
D. Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Objek Penelitian.....	29
B. Jenis Penelitian dan Sumber Penelitian.....	29
C. Populasi dan Sampel.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Indikator Variabel.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	42
B. Identitas Responden.....	42
C. Analisis Data.....	44
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	59
---------------------	----

LAMPIRAN	
----------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Indikator Variabel.....	32
Tabel 4.1 Identitas responden berdasarkan jenis kelamin.....	43
Tabel 4.2 Identitas responden berdasarkan usia.....	43
Tabel 4.3 Identitas responden berdasarkan pendidikan.....	44
Tabel 4.4 Hasil Uji validitas.....	45
Tabel 4.5 Hasil uji reliabilitas.....	46
Tabel 4.6 Hasil uji normalitas.....	47
Tabel 4.7 Hasil uji multikolinearitas.....	49
Tabel 4.8 Hasil uji heterokedastisitas.....	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	51
Tabel 4.10 Hasil Uji T.....	52
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	53
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	24
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LampiranI. Kuesioner Penelitian

LampiranII. Tabulasi Data

LampiranIII. Hasil Uji Validitas

LampiranIV. Hasil Uji Reliabilitas

LampiranV. Hasil Uji Asumsi Klasik

LampiranVI. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

LampiranVII. Hasil Uji Hipotesis

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Latifah Meyyana Enggar Wati

Nim. 19210076

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai dari 15 Kelurahan di Kecamatan Mojolaban. Sampel penelitian berjumlah 45 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci : sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas laporan keuangan

ABSTRACT

FACTORS THAT AFFECT THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS

Latifah Meyyana Enggar Wati

Nim. 19210076

This research is a quantitative research that aims to determine the factors that affect the quality of financial statements. The population in this study were employees from 15 villages in Mojolaban District. The research sample amounted to 45 people. Data collection using questionnaire techniques. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the variables of regional financial accounting system, human resources, internal control system, information technology affect the quality of financial statements.

Key words: *regionality financial accounting system, human resources, internal control system, information technology, quality of financial statements.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan demokrasi dengan segala bentuk pemerintahan dan segala aturan yang harus ditaati oleh segala aspek masyarakat terutama para pegawai yang bergerak pada bidang pemerintahan. Pemerintah pusat selalu melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan, maupun aturan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Pemerintah daerah juga diharuskan meningkatkan pelayanan, sarana, prasarana pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dari berbagai aspek. Pemerintah mewajibkan menyusun laporan keuangan tiap tahun bahkan tiap bulannya dan segala bentuk pertanggung jawaban guna untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran daerah secara berkala, untuk mengelola aset daerah dan sebagai pengambilan keputusan bagi kepala pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi, pemerintah juga mempunyai standar yang khusus untuk membentuk laporan keuangan yang mungkin berbeda dengan laporan keuangan dari perusahaan pada umumnya yakni menggunakan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah dibuat guna untuk menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menyusun laporan keuangannya hingga

menjadi laporan keuangan yang berkualitas serta mudah dipahami oleh segala lapisan. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yakni bahwa pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan pertanggung jawabannya melalui laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Pengelolaan laporan keuangan daerah di Indonesia masih terdapat kasus-kasus tentang kelemahan sistem, ketidakpatuhan, ketidakhematan, tidak efisien, hingga penyelewengan. Pada masalah akibat ketidakpatuhan, BPK melaporkan ada 2.026 permasalahan dengan nilai kerugian mencapai 12,64 triliun. Selain itu terdapat 853 permasalahan penyimpangan administrasi. Fenomena ketidakpatuhan dan penyelewengan ini jamak terjadi di lingkungan organisasi pemerintah, misalnya kasus dugaan korupsi pemotongan dana bantuan operasional kesehatan yang dilakukan bendahara Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2018. Selain itu ada kasus suap yang melibatkan sekretariat daerah Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur di tahun 2010 (Kompas.com).

Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan mantan Camat Purbalingga sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan APBD, dari laporan hasil pemeriksaan disebutkan bahwa kerugian negara mencapai 424

juta dari tahun 2017 hingga tahun 2020 (BPK Jateng.id). Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2020. Meskipun memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jateng antara lain pengelolaan belanja bantuan sosial untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) belum sepenuhnya memadai selain itu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) belum dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 (BPK Jateng.id).

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Kerasidenan Surakarta. Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Baki, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tawangsanari, Kecamatan Weru. Kabupaten Sukoharjo memiliki organisasi perangkat daerah sebanyak 40 termasuk Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektora, Satuan Polisi Pamong Praja dan kecamatan. Menurut data yang diperoleh dari *website* resmi (ppid.sukoharjo) menyatakan bahwasanya Kabupaten Sukoharjo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah sendiri, Kabupaten Sukoharjo mendapatkan 4 kali

opini Wajar Tanpa Peengecualian (WTP) dari tahun 2015 sampai dengan 2018 (semarang.bpk). Permasalahan yang terjadi berdasarkan data tersebut bahwa Kabupaten Sukoharjo masih terjadi masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang harusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintahan yang berlaku. Pada tahun 2016 di Desa Palur Kecamatan Mojolaban terdapat masalah yaitu korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa (Kades) Palur yang diduga melakukan korupsi ADD antara 2007 sampai 2013. Selama 2007-2013 penerimaan atas pendapatan Desa Palur senilai 3.785 miliar yang terdiri dari pendapatan asli Desa 1 miliar dan dana bagi hasil dan bantuan keuangan pemerintah senilai 2,7 miliar. Dari dana senilai 3.785 miliar diketahui 3,2 miliar atau 85% pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kepala Desa, tanpa melibatkan Bendahara dan Sekretaris Desa Palur. Pengelolaan alokasi dana desa itu diketahui tidak tercatat dengan baik. Dari beberapa pengeluaran dana semisal untuk pembelian makanan dan minuman, bantuan operasional PKK, kegiatan pemuda diketahui ada yang fiktif (solopos.com). Pada tahun 2013 Kelurahan Desa Triyagan terdapat masalah yaitu administrasi keuangan yang belum dikerjakan secara tertib dan tepat waktu, hal ini dikarenakan kurangnya kompetensi sumber daya manusia tentang standar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut (Erlina, 2013) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses, pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan

keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penata usahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya (Defitri, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lutfiyanti, 2018) dan penelitian yang dilakukan oleh (Defitri, 2018) dengan variabel yang sama membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan hasil penelitian dari (Alysa Media Wulandari, 2020) sistem akuntansi keuangan daerah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan.

Sumber daya manusia juga diperlukan dalam menyusun kualitas laporan keuangan, masih buruknya pembenahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat ataupun daerah saat ini tidak terlepas dari faktor kurangnya pemahaman dalam penyusunan kualitas laporan keuangan. Menurut (Trisnawati, 2018) laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah semakin baik apabila pengelolaan SDM juga baik. Menurut (Taman, 2017) kualitas sumber daya manusia ialah kemampuan karyawan untuk berurusan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan tugas. SDM yang mempunyai kompetensi yang baik pasti akan mampu bekerja secara optimal dengan demikian segala tujuan

pemerintah daerah dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Menurut penelitian (Dewi Andini, 2016) sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini mendukung pernyataan dari (Gusti Ayu Krisna Dewi, 2020) tentang sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pernyataan tersebut ditolak oleh (Ulfa Rima Nugraheta, 2017) berdasarkan penelitiannya mengatakan bahwa sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Nasution, 2007) menyatakan ada beberapa kelemahan dalam sistem keuangan Negara Indonesia yaitu kelemahan dalam desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyimpanan keuangan negara yang rumit, tidak adanya informasi tentang aset dan hutang negara dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak memadai. Pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU Nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepala organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Penelitian sebelumnya (Eveline, 2016) pengolahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi pengendalian internal yang baik menghidupkan semangat organisasi untuk melanjutkan upaya mempertahankan kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian (Aditya, 2018) membuat laporan keuangan untuk pemerintah harus melalui proses dan fase yang diatur oleh sistem akuntansi pemerintah, secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan yang dilakukan oleh manajemen keuangan. Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah daerah dapat membangun, mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian internal yang sesuai. Menurut (Tuti Herawati, 2014) mengatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan

dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan pada masyarakat. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Menurut (Rifandi, 2019) teknologi informasi adalah aplikasi untuk menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah oleh pemerintah daerah untuk dapat menggunakan semua jenis informasi dan teknologi komputer untuk informasi dan layanan pemerintah kepada publik. Penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi dapat mempengaruhi kepuasan pengguna dengan laporan keuangan karena kualitas dan keakuratan data. Penerapan teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan (Widarsono, 2017). Menurut (Mochammad Annas, 2021) Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan dan permasalahan yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Kecamatan Mojolaban

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
4. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pengelolaan laporan keuangan. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan. Selain itu juga menambah wawasan tentang standar akuntansi dan cara membuat laporan pertanggung jawaban sesuai aturan pemerintah
 - b. Menambah referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut
2. Manfaat Praktis
 - a. Dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat menambah informasi

dalam pengambilan keputusan tentang laporan keuangan

- b. Menambah wawasan organisasi pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut (Hehanussa, 2015) teori keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini dapat dilihat dari hubungan itu kontrak antara agen dan prinsipal dimana agen memiliki keunggulan karena memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal dikarenakan agen merupakan pemangku keputusan. Salah satu informasi yang dimiliki oleh agen adalah laporan keuangan. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak agen yang memiliki tanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan serta mempublikasikannya untuk memudahkan akses bagi masyarakat sebagai pihak prinsipal memiliki hak untuk mengetahui seberapa jauh pertanggungjawaban dari pemerintah untuk masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan

antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintah) yang harus menerapkan strategis tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil laporan keuangan yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan, aktivitas tersebut kemudian dituangkan dalam angka-angka baik berupa mata uang rupiah maupun mata uang asing (Kasmir, 2015). Menurut PSAK No. 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. (Munawir, 2015) mendefinisikan laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba-rugi. Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, tetapi sangat penting juga untuk memikirkan aktiva riil dibalik

angka-angka tersebut. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah.

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen bersangkutan, pada dasarnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan dan menilai posisi keuangan perusahaan tersebut pada waktu tertentu dimana dengan melakukan analisis laporan keuangan maka pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dapat mengambil dan menentukan suatu keputusan sesuai dengan kepentingannya.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) tujuan laporan keuangan yaitu :

- a. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya tentang aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan
- b. Memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba
- c. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva neto suatu perusahaan yang timbul dari

kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba

- d. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi
- e. Memberikan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan

3. Kualitas Laporan keuangan

(Nordiawan, 2010) menyatakan bahwa definisi kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010, menyatakan ada 4 karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memperidiksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya yang mencakup 3 hal

berikut: memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut: penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat

dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna, antara lain

- 1) Pengambilan keputusan investasi
- 2) Penilaian aliran kas
- 3) Penilaian sumber-sumber ekonomi
- 4) Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana
- 5) Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana
- 6) Menganalisis penggunaan dana

4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi dalam rangka pengambilan keputusan. Lebih lanjut dikatakan, dalam konteks akuntansi keuangan daerah terdapat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Berikut beberapa pengertian SAKD menurut para ahli dan peraturan menteri dalam negeri. Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan komputer yang mulai dari

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan berakhir pada pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Sedangkan(Erlina, 2015) menyatakan bahwa SAKD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang bertema umum. Berdasarkan pendapat beberapa ahli dan peraturan di atas maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu prosedur yang dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pelaporan keuangan dengan

menggunakan sistem dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah

daerah meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, akuntansi aset dan penyajian laporan keuangan. Menurut (Halim, 2015) SAKD secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu:

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD

b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/ atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD

c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas,

penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang digunakan SKPD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset

d. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian keuangan selain kas

Dari keempat prosedur di atas menandakan bahwa untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi dalam rangka pengambilan keputusan diperlukan suatu media untuk mengkomunikasikan program pemerintah. Salah satu media yang dipandang relevan dalam mengkomunikasikan dan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi program-program pemerintah yang tercermin dalam APBD adalah sistem akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan

5. Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

(Wirawan, 2015) menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau

tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi. Hal senada disampaikan oleh (Eddy Soeryanto Soegoto, 2014) memberi pengertian yaitu sumber daya manusia adalah individu-individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah individu-individu atau yang disebut sebagai tenaga kerja, karyawan, potensi manusiawi yang bekerja untuk organisasi. Sumber daya manusia mempunyai tolak ukur yang dapat dijadikan patokan atau perbandingan agar kita bisa mengetahui dan menentukan manusia yang berkualitas. Dengan adanya batasan dan tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi seseorang.

Pengertian yang dikemukakan oleh (Selo Sumarjan, 2009) yang dikutip oleh (Sudarwan Danim, 2012) bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kita inginkan dibedah atas dasar kualitas fisik (kesehatan, kekuatan jasmani, keterampilan dan ketahanan) dan kualitas non fisik (kemandirian, ketekunan, kejujuran dan akhlak).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi dengan aspek keterampilan yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, kejujuran dan pengalaman

Indikator kualitas sumber daya manusia Menurut (M. Dawan Rahardjo,

2010) mengatakan bahwa indikator dari kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi.
- b. Memiliki pengetahuan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa daerah dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.
- c. Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- d. Memiliki tingkat ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja baik yang di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

6. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi. Menurut (Mulyadi, 2016) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya

kebijakan manajemen.

Pengertian sistem pengendalian intern menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) yang dikutip oleh Bambang Hartadi menyebutkan, sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan. Sedangkan (IAI, 2001) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a. Keandalan laporan keuangan,
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa pengendalian intern adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan

staf pemeriksa intern. Tujuan Pengendalian Intern menurut (Arens, 2008)

adalah :

a. Keandalan Laporan Keuangan.

Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan seperti *General Accepted Accounting Principle* (GAAP).

b. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi.

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Perusahaan publik, perusahaan non publik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan.

Tujuan utama dirancangnya pengendalian intern dari segi pandang manajemen adalah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, dipatuhinya kebijakan akuntansi, dan pengamanan aset perusahaan. Namun pada umumnya tujuan pengendalian intern

tersebut merupakan tujuan ideal yang harus dicapai setiap perusahaan, tercapai atau tidaknya tujuan tersebut tergantung pada kelengkapan unsur-unsur pengendalian intern yang dilaksanakan oleh perusahaan serta hubungan yang saling menangani diantara unsur-unsur tersebut.

Pengendalian intern mencakup 5 (lima) komponen dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang serta digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Menurut (IAI, 2011) komponen pengendalian intern terdiri dari :

a). Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini:

1). Integritas dan nilai etika merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas, bagaimana hal ini dikomunikasikan, dan ditegakkan dalam praktik. Standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personel melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum, atau melanggar etika. Standar tersebut juga mencakup komunikasi nilai-nilai dan standar perilaku entitas kepada personel melalui pernyataan kebijakan dan kode etik serta

dengan contoh nyata.

2).Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan.

3).Partisipasi dewan komisaris dan komite audit yaitu atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan komisaris atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan atau komite tersebut kepada manajemen, dan interaksi dewan atau komite tersebut dengan auditor intern dan ekstern

4).Filsafah dan gaya operasi manajemenmenjangkau tentang karakteristik yang meliputi antara lain pendekatan manajemen dalam mengambil dan mamantau risiko usaha,sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya.

5). Struktur organisasi suatu entitas memberikan kerangka

kerja menyeluruh bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. Selain itu, struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab dalam entitas dengan cara yang semestinya.

6). Pembagian wewenang dan tanggung jawab, metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas.

7). Kebijakan dan praktik sumber daya manusia berkaitan dengan pekerjaan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, dan pemberian kompensasi, dan tindakan perbaikan.

b. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan

entitas.

6. Teknologi Informasi

Kemunculan Teknologi Informasi (TI) dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. (Kadir, 2005) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, tidak hanya membantu bekerja dan melakukan tugas-tugas yang berkecimpung dalam dunia komputer saja tetapi telah berkembang dalam bidang lainnya seperti sains, perbankan, perpustakaan, teknik dan lain sebagainya. (Setiawan, 2009) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Peran yang dapat diberikan oleh teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, kelompok dan asosiasi profesi. Teknologi informasi banyak digunakan untuk pengelolaan pekerjaan karena efektivitasnya yang mampu mempercepat kinerja. Kecepatan kinerja pada akhirnya akan mempermudah pertukaran informasi dan penyebaran pengetahuan menjadi lebih cepat. (Setiawan, 2009)

menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi didasarkan pada kebutuhan untuk berinteraksi mulai dari gambar, huruf, kata, kalimat, tulisan, surat, sampai dengan telepon dan internet. Salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat adalah karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi TI yang menyebabkan percepatan penyebaran data atau informasi.

B. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan kualitas laporan keuangan terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut ini hasil penelitian dari Surastiani dan Handayani (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Aditya Sanjaya (2017) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 22.

Penelitian Susilowati (2014) menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Nurillah As-Syifa (2014) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Kartika Indriya (2013) menunjukkan hasil sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel (X)	Variabel (Y)	Alat analisis	Hasil
1	Surastiani dan Handayani (2015)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Kualitas sumber daya manusia (X1) Sistem pengendalian intern (X2) Teknologi informasi (X3)	Kualitas laporan keuangan	Regresi linear berganda	Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan teknologi

						informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2	Aditya Sanjaya (2017)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan	Sistem akuntansi keuangan daerah (X1) Pengendalian intern (X2) Sumber daya manusia (X3)	Kualitas laporan keuangan	Uji hipotesis yang diproses oleh SPSS	Sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
3	Susilawati (2014)	Pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas	Standar akuntansi pemerintahan (X1) Pengendalian intern (X2)	Kualitas laporan keuangan	Uji regresi linear berganda	Standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem

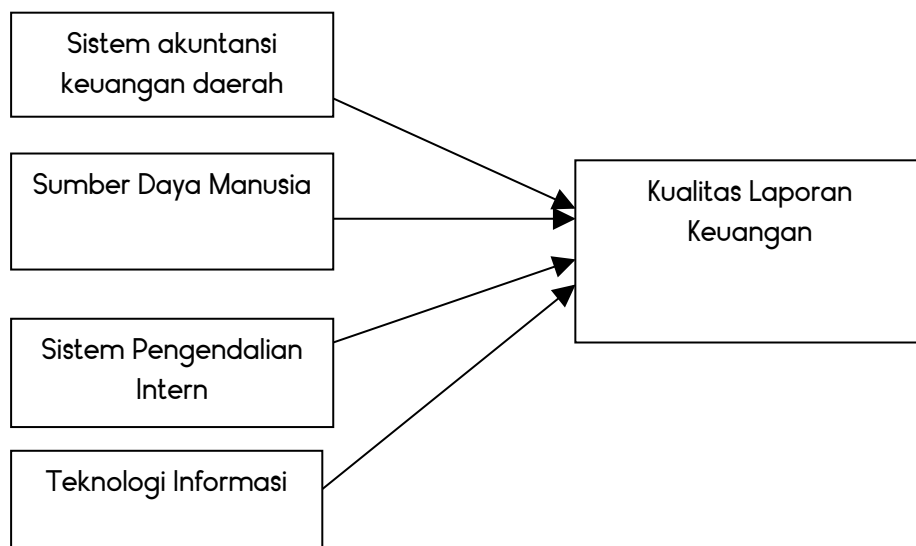
		laporan keuangan				pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
4	Nurillah As Syifa (2014)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan	Kompetensi sumber daya manusia (X1) Sistem akuntansi keuangan daerah (X2) Teknologi informasi (X3) Pengendalian intern (X4)	Kualitas laporan keuangan	Uji regresi linear berganda	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi, dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
5	Kartika Indriya (2013)	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap	Sistem pengendalian intern pemerintah (X1)	Kualitas laporan keuangan	Uji regresi linear berganda	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

		kualitas laporan keuangan				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran dari penelitian ini :

Gambar 2.1 kerangka pikir



Berdasarkan kerangka pikir pada *gambar 2.1* terdapat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah baik parsial maupun simultan yang disebut variabel independen. Hubungan antara

variabel independen dengan dependen dijelaskan dengan teori agensi, berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan.

D. Hipotesis

Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Pasal 24 SAKD merupakan serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Tujuan sistem akuntansi keuangan adalah pertanggungjawaban, manajerial, pengawasan. Untuk menghasilkan laporan keuangan relevan, Handal, dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan atau masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat pada laporan keuangan yang di hasilkan kurang berkualitas. Dari uraian tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu

H1 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Kompetensi SDM yakni SDM yang mempunyai kualitas yang baik, memiliki pemahaman akuntansi dan keuangan serta mempunyai pendidikan dengan latar belakang yang sesuai pada tanggungjawabnya yaitu akuntansi dan keuangan, akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang baik (Saraswati dan Budiasih, 2019). SDM yang mempunyai kompetensi yang baik pasti akan mampu bekerja secara optimal dengan demikian segala tujuan pemerintah daerah dapat tercapai dan berjalan dengan baik. SDM yang mempunyai pengetahuan tentang akuntansi, memahami apa yang seharusnya dilaksanakan menyebabkan laporan keuangan dibuat dan disajikan sesuai dengan waktunya (Anggreni, 2018) maka dari penjelasan ini dibangun hipotesis kedua yaitu :

H2 : Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Tujuan sistem pengendalian internal menurut (Warren et al, 2005) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Menurut (Yudianta, 2012) pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Hal ini didukung dengan hasil penelitian (Zuliarti, 2012) bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Maka dari uraian ini dibangun hipotesis ketiga yaitu :

H3 : Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi akan dapat membuat laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas karena teknologi yang digunakan memiliki kecepatan dan keakuratan dalam menyusun laporan keuangan. Kemajuan teknologi informasi mempunyai pemanfaatan yang luas, seseorang dapat mengakses, mengelola, dan menggunakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Basudewa, 2020) dan (Utari,2020) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Peneliti berdasarkan olah data dan pembahasan dapat menarik kesimpulan :

1. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pemahaman dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat
2. Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah hal ini menunjukkan bahwa semakin berkompeten sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah
3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat sistem pengendalian intern maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah

4. Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan hal ini menunjukkan bahwa semakin memadai dan semakin canggih teknologi informasi dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

B. Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran yang diungkapkan penulis pada penelitian ini :

1. Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan pemahaman akan sistem akuntansi keuangan daerah kepada pegawai karena sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh guna meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memilah sumber daya manusia yang lebih berkompeten dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Apabila sumber daya manusia lebih berkompeten dan bertanggung jawab maka akan sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan agar sesuai standar pemerintah yang berlaku.
3. Pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan sistem pengendalian intern karena sistem pengendalian intern akan sangat berpengaruh dalam pengawasan keuangan dan meminimalisir kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah.

4. Teknologi informasi berpengaruh dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, pemerintah diharapkan untuk melengkapi teknologi pada setiap daerah secara merata untuk menunjang peningkatan pada kualitas laporan keuangan yang baik karena teknologi yang semakin canggih akan memudahkan pekerjaan dan mempersingkat waktu
5. Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai sebesar 47,3% yang mengartikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah (X1), sumber daya manusia (X2), sistem pengendalian intern (X3), teknologi informasi (X4) hanya memiliki pengaruh sebesar 47,3% pada kualitas laporan keuangan. Sehingga nilai sisa sebesar 52,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya, diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel independan lain diluar variabel dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*, 7(1), 89-103.
- Andini, Dewi. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan." *Jurnal Ekonomi KIAM* 26.1 (2015): 65-82.
- Animah, A., Suryantara, A. B., & Astuti, W. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(1), 99-109.
- Arikunto, Suharsimi. "Suhardjono; Supardi. 2006." *Penelitian tindakan kelas* (1999): 16-22.
- Chairina, F., & Wehartaty, T. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKPD Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 31-39.
- Darma, B. (2021). Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R²). *Guepedia*.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64-75.
- Eveline, Franta. "Pengaruh SAP Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas SDM, Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap
- Faishol, A. (2016). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Kualitas laporan keuangan (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten lamongan). *Jurnal penelitian ekonomi dan akuntansi*, 1(3), 205-212.
- Gunawan, C. (2018). Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data Dengan IBM SPSS Statistic 25). *Deepublish*.
- Herawati, T. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Star*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.55916/jsar.v1i1.44>
- Heriyanto, Necho, and Sri Mujiarti Ulfa. "Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam

Memberikan Pelayanan Publik (Studi Penelitian Di Kantor Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir).” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 8.2 (2022): 120-130.

Hidayat, A. A. (2021). Menyusun instrumen penelitian & uji validitas-reliabilitas. *Health Books Publishing*.

<https://ppid.sukoharjokab.go.id/> , diakses pada 30 Oktober 2022

<https://www.bpk.go.id/representation> , diakses pada 30 Oktober 2022

<https://m.solopos.com/tag/kades-palur>, diakses pada 31 Oktober 2022

Husna, A., Maryam, M., & Ikhbar, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 206-214.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Jakarta (ID): RI* (2004).

Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290-1318.

Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170-178.

Lutfiyanti, Annisa Rizky. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Subang)*. Diss. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung, 2018.

Moleong, Lexi J., and P. R. R. B. Edisi. “Metodelogi penelitian.” *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya* (2004).

Moleong, Lexy J. “Metodologi penelitian kualitatif (Cet. Ke-30.)” *Bandung: Remaja Rosdakarya* (2012): 93-106.

Mulyadi, Deddy. “Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.” (2016).

Muzahid, M. (2014). Pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 2(2), 179-196

Nugraheta, Ulfa Rima, and Muhammad Abdul Aris. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Surakarta)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Permadi, A. D. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)*.

Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14-28.

Priyatno, Dwi. "Mandiri belajar SPSS: untuk analisis data dan uji statistik." (2008).

Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).

Rio Gusherinsya, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 58-68.

Satori, Djaman, and Aan Komariah. "Teknik Pengumpulan Data." *Jakarta: Salemba Empat* (2011).

Setiawan, Anthony, Irena Koprinska, and Vassilios G. Agelidis. "Very short-term electricity load demand forecasting using support vector regression." *2009 International Joint Conference on Neural Networks*. IEEE, 2009.

Soeryanto Soegoto, Eddy. "Effect of lectures' recruitment model, work satisfaction and organizational culture toward turnover of lectures (case study: female lectures at Indonesia Computer University)." (2014).

Tumbel, Jinnyfer, Sifrid Pangemanan, and Stanly Alexander. "Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Minahasa Selatan." *Indonesia Accounting Journal* 1.2 (2019): 120-128.

Widari, L., & Sutrisno, S. (2017). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan Keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 5(10), 117-126.

Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship (e-Journal)*, 10(2).

LAMPIRAN

Lampiran i. Kuesioner

A. Identitas Responden

Nama Instansi :
Nama Responden :
Umur :
Jenis kelamin :
Pendidikan :

B. Petunjuk pengisian Kuisisioner

Berikut ini merupakan pernyataan pernyataan yang mewakili pendapat pendapat umum mengenai kondisi di dalam instansi Bapak/Ibu. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Bapak/Ibu mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberi checklist (v) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut :

Penilaian :

STS : Sangat Tidak Setuju : Nilai 1

TS : Tidak Setuju. : Nilai 2

N : Netral : Nilai 3

S : Setuju : Nilai 4

SS : Sangat Setuju : Nilai 5

1. Pengukuran kualitas laporan keuangan

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1.	Informasi dalam laporan keuangan dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu					
2.	Informasi dalam laporan keuangan dapat Memprediksikan yang akan datang					
3.	Laporan keuangan disajikan dengan tepat waktu Sesuai periode akuntansi					
4.	Informasi dalam laporan keuangan dapat Digunakan untuk pengambilan keputusan					
5.	Informasi dalam laporan keuangan adalah wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan					
6.	Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya					
7.	Informasi dalam laporan keuangan mudah Dipahami dengan jelas					
8.	Informasi dalam laporan keuangan sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					

2. Pengukuran penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1.	Penerapan sistem akuntansi pada SKPD saya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
2.	Melakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan yang terjadi SKPD					
3.	Melakukan pencatatan pada setiap transaksi Yang terjadi SKPD					
4.	Setiap pencatatan transaksi yang ada disertai Oleh bukti					
5.	Pencatatan yang dilakukan pada SKPD saya secara kronologis					
6.	Melakukan klasifikasi pada setiap transaksi yang Terjadi					

7.	Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD saya Dilakukan setiap periode akuntansi					
8.	Pelaporan laporan keuangan pada SKPD saya Dilakukan secara konsisten dan periodik					

3. Pengukuran kualitas sumber daya manusia

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1.	SDM bagian keuangan minimal lulusan SMA/SMK Akuntansi					
2.	SKPD memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan mampu menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi.					
3.	Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki Sumberdaya yang memadai					
4.	Perantanggungjawab seluruh pegawai sub bagian keuangan /akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.					
5.	Pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan.					
6.	Sub bagian keuangan/akuntansi mendapat Sosialisasi peraturan baru					
7.	Sub bagian keuangan/akuntansi memahami Struktur organisasi pada SKPD saya					

4. Pengukuran penerapan sistem pengendalian intern

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1.	Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran Telah dibuatkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP).					
2.	Pada SKPD saya sudah diimplementasikan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat mencegah kecurangan dan penyelewengan					
3.	Pembuatan dan penggunaan dokumen dan Catatan yang memadai					
4.	Adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk Melakukan suatu kegiatan atau transaksi.					

5.	Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. (Penggunaan Formulir Bernomor Urut Cetak Terurut)					
----	---	--	--	--	--	--

1. Pengukuran penerapan teknologi informasi

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Penerapan teknologi informasi pada SKPD saya telah memenuhi dan memadai					
2.	Jaringan internet telah terpasang pada SKPD Saya					
3.	Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai Penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan					
4.	Sub bagian keuangan/ akuntansi memiliki <i>software</i> aplikasi untuk melaksanakan tugas, seperti : <i>Microsoft Excel</i> , MYOB, dan sebagainya.					
5.	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
6.	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan					